



BPK Periksa Anggaran Pemilu

Enam KPU Jadi Sampel

PONTIANAK, TRIBUN - Petugas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan keuangan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Pontianak Utara di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (1/9).

Pemeriksaan yang dilakukan terkait penggunaan anggaran Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Pemeriksaan dihadiri dua anggota BPK RI Perwakilan Kalbar, KPU Kota Pontianak, Ketua dan Sekretaris PPK Pontianak Utara.

Ketua PPK Pontianak Utara Muhlis Ssos mengatakan, pemeriksaan penggunaan anggaran Pilleg dan Pilpres ini baru pertama kali dilakukan di PPK Pontianak Utara.

"Kita belum tahu, apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tidak. Pastinya, selama ini kita bekerja sesuai dengan peraturan," ujar Muhlis

kepada *Tribun*, Senin (1/9).

Selama menjalankan tugas, jelas Muhlis, pihaknya menggunakan anggaran sesuai peraturan. "Malam itu, kami menerima anggaran dari KPU, langsung diserahkan ke PPS," ucapnya.

Ia menegaskan, jika hasil pemeriksaan BPK terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran Pilleg dan Pilpres, pihaknya menyerahkan langsung ke pihak berwenang.

"Kita harap tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Pilleg dan Pilpres. Sebab, proses penggunaan keuangan selama ini tidak ada masalah," ungkapnya.

Sekretaris PPK Pontianak Utara Nawari mengatakan, pemeriksaan ini merupakan agenda rutin dari BPK RI seusi Pemilu. "Insya Allah, tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran Pilleg dan Pilpres," ujarnya.

Ada 48 orang anggota PPK, KPPS dan PPS yang hadir da-

"Kita belum tahu, apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tidak. Pastinya, selama ini kita bekerja sesuai dengan peraturan. **

MUHLIS

Ketua PPK Pontianak Utara

lam pemeriksaan ini. "Dalam pemeriksaan, BPK hanya menanyakan seputar penggunaan anggaran Pilleg dan Pilpres saja," ucapnya.

Jumlah anggaran Pilleg 2014 yang diterima PPK Pontianak Utara dari KPU sebesar Rp 1.127.307.000. Sedangkan ang-

"Sebab, pemeriksaan ini merupakan syarat dari nasional," ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, untuk Kalbar yang diperiksa KPU Provinsi, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kayong Utara dan Ketapang. "Mengapa tidak semua KPU yang diperiksa karena, hanya mengambil sampel saja," tuturnya.

Ditanya apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran Pilleg dan Pilpres, ia menegaskan, tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Hanya saja, pemeriksaan ini memang dilakukan seluruh BPK terhadap KPU. (rul)

Pertanggungjawabkan Anggaran

KETUA KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty mengatakan, saat ini anggaran Pemilu 2014 sedang di audit oleh BPK. Audit ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maka, KPU berkewajiban melaporkan, pertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, audit BPK itu adalah hal yang normatif," ujar Umi kepada wartawan.

KPU Kalbar, jelasnya, menunggu hasil audit yang dilakukan BPK ini. "Pastinya ada ketentuan dari BPK," ungkapnya. (rul)